BESTARI

HARIAN
LENTERA TODAY
Inspirasi Perubahan

EDISI JUMAT / 17

MEDIA TERVERIFIKASI

HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

'BAU ANYIR' MONOPOLI EKSPOR BENIH LOBSTER TERENDUS

Tentu masih segar diingatan terkait pro-kontra ijin ekspor benih lobster. Saat itu perdebatan warga, mulai nelayan hingga pelaku industri kelautan memanas karena Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo resmi mencabut larangan ekspor benih lobster era Susi Pudjiastuti. Kini gaduh terjadi kembali karena Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus 'bau anyir' monopoli ekspor benih lobster. Adakah keterlibatan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha tidak sehat tersebut?

Baca Hal 11

SCAN ME

PERBANDINGAN NILAI EKSPOR LOBSTER VIETNAM DAN INDONESIA DI MASA SUSI PUDJIASTUTI

INDONESIA		VIETNAM
US$ 11,81 Juta	2014	US$ 13,59 Juta
US$ 7,09 Juta	2015	US$ 11M35 Juta
US$ 14,85 Juta	2016	US$ 6,77 Juta
US$ 17,31 Juta	2017	US$ 6,12 Juta
US$ 28,45 Juta	2018	US$ 4,24 Juta

SUDAHKAH INDONESIA SEHAT?

Kamis kemarin, tepat tanggal 12 November, jika dilihat di kalender, tidak ada yang istimewa dari tanggal tersebut. Warnanya hitam dan tidak ada keterangan apa-apa. Padahal, di tahun 2020 ini, tanggal 12 Novermber sebagai Hari Kesehatan Nasional menjadi momen istimewa. Ini tak lain karena tahun ini berada di tengah pandemi Covid-19, dimana isu kesehatan bak gadis cantik yang selalu menjadi pembicaraan.

Ya, sampai saat ini masyarakat masih dihantui dengan virus corona. Sebagian besar masyarakat meyakini bahwa hantu itu (baca virus corona) siap meneror masyarakat kapanpun, seperti hanya terror di awal-awal pandemi ini terjadi. Mereka inilah yang gigih mentaati apa yang disarankan pemerintah berupa menjalankan protokol kesehatan. Tentu yang menjadi harapan mereka adalah supaya hantu bernama virus corona ini tidak menghampirinya.

Seiring dengan hal itu, Hari Kesehatan Nasional ke-56 ini pun mengambil tema "Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat". Kemudian sub-temanya "Jaga Diri, Keluarga dan Masyarakat, Selamatkan Bangsa dari Pandemi Covid-19".

Tema itu diharapkan menjadi cambuk bagi pemerintah untuk terus bergerak melakukan ajakan dan edukasi pada masyarakat dalam melawan Covid-19. Hal ini seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Di Hari Kesehatan Nasional, Khofifah mengajak seluruh komponen masyarakat Jatim menyatukan tekad dan semangat untuk melepaskan diri dari krisis akibat pandemi Covid-19. Menurut Khofifah, Hari Kesehatan Nasional tahun 2020 harus menjadi momentum untuk merubah prilaku masyarakat agar selalu hidup bersih dan sehat.

Namun, jika mencermati tema tersebut, seolah masyarakat Indonesia belum memiliki tekad yang satu untuk menuju Indonesia Sehat khususnya dalam melawan Covid-19. Sehingga, butuh upaya terus menerus untuk menyadarkan masyarakat supaya taat pada protokol kesehatan untuk menuju Indonesia Sehat dan lepas dari pandemi Covid-19.

Ya, meski pemeritah mengklaim telah berhasil mengurangi bahkan mengendalikan penyebaran Covid-19, seperti di Jatim, dimana saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang masuk dalam kategori zona merah, meski juga tidak ada yang masuk kategori zona hijau. Namun, apakah penyebaran Covid-19 sudah benar-benar terkendali?

Jika kita melihat data nasional terkait dengan penyebaran Covid-19 di Jatim, ternyata jumlah orang yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19 masih mencapai ratusan orang tiap harinya.

Ambil saja data tertanggal 12 November kemarin, tercatat ada 270 orang baru yang infeksi Covid-19. Dan jumlah yang dirawat pun masih ada 2.063 orang. Itu baru data di Jawa Timur, lantas bagaimana dengan data secara nasional? Diketahui secara nasional masih ada 55.274 orang yang menjalani perawatan akibat terinfeksi Covid-19.

Masih cukup menakutkan memang, itulah sebabnya pemerintah terus menekankan penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran. “Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kasus Covid-19. Saat ini kasus di Jatim terus turun, namun tidak berarti ini membuat kita lengah, justru harus terus waspada. Jangan sampai ada gelombang kedua, sehingga angkanya naik lagi,” kata Gubernur Jawa Timur, Khofifah.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah pemerintah sudah berhasil dalam mengatasi Covid-19? Jawabannya pun masih debatable. Beberapa waktu yang lalu, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono sempat menganggap bahwa Indonesia gagal menangani pandemi Covid-19. Ungkapan tersebut berdasarkan dari data perkembangan Covid-19 yang masih cukup tinggi.

Semoga saja, dengan Hari Kesehatan Nasional ke 56 yang mengambil tema "Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat" mampu membawa Indonesia benar-benar menuju lebih sehat. Mampu menyadarkan masyarakat supaya menjaga diri, menjaga keluarga dan masyarakat, hingga ujung-ujungnya mampu menyelamatkan bangsa ini dari pandemi Covid-19.(*)

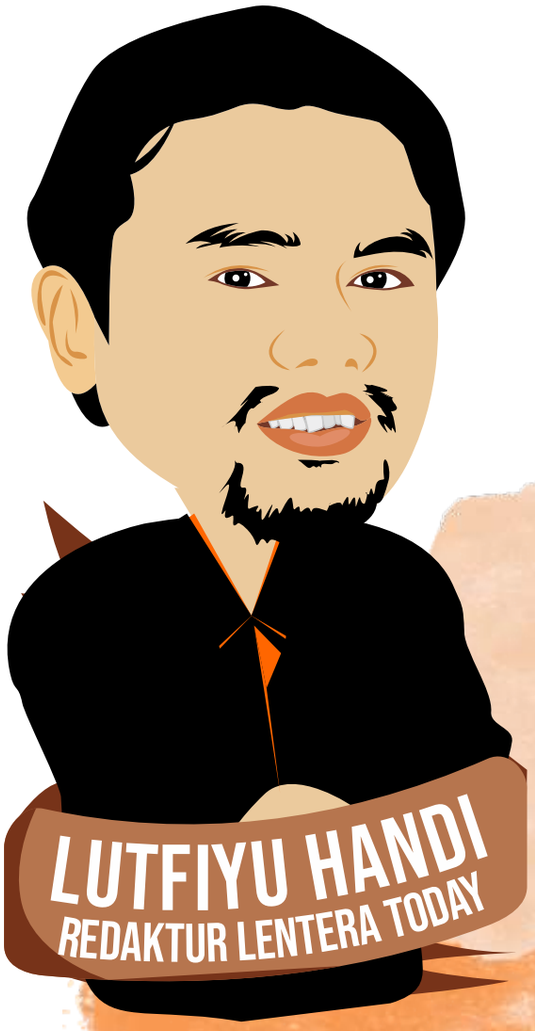

RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

PEMINUM TERANCAM 2 TAHUN BUI DAN DENDA RP 50 JUTA

Badan Legislasi DPR tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol. Sanksi pidana atau denda bagi peminum minuman beralkohol turut diatur. Ancaman penjara dan denda hingga puluhan juta bakal dikenakan kepada peminum minuman keras. Hal itu tercantum dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol seperti dilihat, Kamis (12/11/2020).

Di media sosial bukan ancaman hukumannya yang mendapat komentar tajam, tapi daftar pustakanya. Sebuah postingan viral di media sosial yang mempermasalahkan isi naskah akademik (NA) Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol (Minol).

Dalam unggahan itu, terlihat bahwa bagian daftar pustaka melampirkan berbagai sumber dari internet seperti portal berita, hingga http://en.wikipedia.org/wiki/Ethanol."Wikipedia dan wordpress dalam naskah akademik. Great!," demikian caption unggahan tersebut.

Naskah akademik yang dipermasalahkan netizen itu memiliki cover bertuliskan tahun 2014. Seperti diketahui, usulan RUU tersebut sudah muncul pada masa jabatan dua periode sebelumnya. Namun, pembahasan RUU tersebut tidak serta mengalami suatu kemajuan sejak 2018.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal mengatakan RUU Larangan Minol yang mengutip Wordpress itu merupakan ulah DPR periode lalu. Saat ini pihaknya diklaim hanya tinggal memperbarui data-data mengapa RUU tersebut wajib diterbitkan.

"NA RUU Larangan Minol sejak awal diusulkan pada periode DPR yang lalu dari fraksi PPP. Kalau ada muncul di wikipedia itu juga Draf RUU Minol yang diusulkan oleh fraksi PPP (yang lalu). Sekarang yang menjadi perubahan untuk diupdate data-data dari WHO akibat karena mengkonsumsi miras," katanya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi (Awiek) juga menyebut RUU yang muncul itu adalah draft lama. Draft RUU yang sedang dibahas baru diterima Baleg pada 17 September 2020, itupun masih akan mengalami penyesuaian atau harmonisasi seiring dengan masukan-masukan yang diterima dari berbagai pihak lain sebelum akhirnya disodorkan ke pemerintah pusat.(ist)

DATA DAN FAKTA TENTANG MINUMAN BERALKOHOL DI INDONESIA

PENGGUNA ALKOHOL BERDASARKAN USIA DI INDONESIA

- Usia 14-16 tahun 47,7 %
- Usia 17-20 tahun 51,1 %
- Usia 21-24 tahun 31,1 %

Konsumsi bir 100 juta liter/tahun

Daerah konsumsi bir tertinggi bali

Bir yang beredar Bir bintang, dan Heineken (Produk MLBI), Anker Beer, San Miguel Beer, Anker stout, Kuda Putih, Carlsber Beer (Produk DLTA)

DAMPAK DAN AKIBAT ALKOHOL DI DUNIA (WHO)

- Meninggal 3 juta orang
- Penguna Alkohol 91 juta penduduk
- Rata-Rata Konsumsi Alkohol usia 15 tahun keatas 6,2 liter alkohol murni/tahun

RANGKING NEGARA PENCINTA ALKOHOL

1. JEPANG
2. ITALIA
3. AUSTRALIA
4. SPANYOL
5. PRANCIS
6. NEGERIA
7. AMERIKA
8. KANADA
9. INGGRIS
10. JERMAN

Naskah : Berbagai Sumber
Desain Grafis : Paulus Ivan

POIN-POIN PENTING RUU LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

PASAL 4

(1) Minuman beralkohol yang dilarang diklasifikasi berdasarkan golongan dan kadarnya sebagai berikut:
a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
(2) Setiap minuman beralkohol berdasarkan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang minuman beralkohol yang meliputi:
a. Minuman beralkohol tradisional; dan
b. Minuman beralkohol campuran atau racikan.
Pasal 5, 6, dan 7 RUU Minol melarang produksi, menyimpan, mengedarkan, menjual, dan mengonsumsi semua jenis minuman beralkohol, kecuali diatur dalam pasal 8.

PASAL 7

Setiap orang dilarang mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol campuran atau racikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

PASAL 8

Memuat ketentuan, minuman beralkohol diperbolehkan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. "Larangan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas," bunyi pasal 8 ayat (1).

PASAL 20

Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp 10.000.000 (sepuluh juta) dan paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

REALISASI CUKAI MINUMAN BERAKOHOL

(TRILIUN RUPIAH)

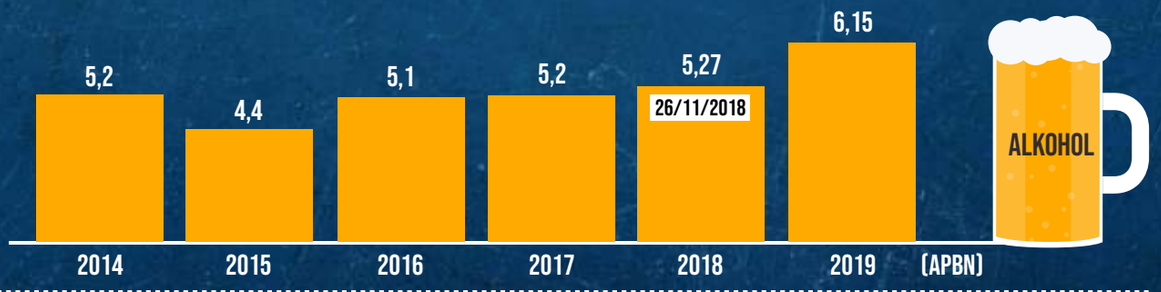

AWAS! GELOMBANG TINGGI ANCAM PESISIR SURABAYA HINGGA 17 NOVEMBER

SURABAYA- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Maritim Tanjung Perak mengeluarkan peringatan gelombang tinggi di pesisir Kota Surabaya. Kondisi ini akan berlangsung selama tiga hari mulai 15-17 November 2020 mendatang.

"Peningkatan kecepatan angin di pesisir Timur Surabaya memicu terjadinya peningkatan tinggi gelombang dalam skala lokal (setinggi 1 meter) dan kemudian bertepatan dengan pasang air maksimum. Sehingga, dapat menyebabkan banjir rob lebih tinggi di pesisir Timur Surabaya," papar Kepala BMKG Maritim Tanjung Perak, Taufiq Hermawan, Kamis (12/11).

Seperti diketahui, kampung nelayan Bulak Nambangan, Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur diterjang gelombang tinggi dan angin kencang pada Rabu (11/11) malam. Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Arrizal Rahman memperkirakan, kondisi itu akan terjadi dalam waktu tiga hingga lima hari ke depan di pesisir Surabaya.

Ia menuturkan, pasang air laut akan mencapai 130 cm dari rata-rata tinggi muka air laut.Namun, Arrizal menuturkan, kondisi cuaca ekstrem terjadi pada Rabu malam 11 November 2020."Tiga hingga lima hari ke depan, pasang air laut masih tinggi capai 130

cm dari rata-rata tinggi muka air laut. Kondisi ekstrem tadi malam," ujar dia.

Ia mengatakan, kondisi gelombang tinggi dan angin kencang berdampak ke kapal nelayan sehingga bisa ke daratan. Ia imbau nelayan untuk antisipasi dan waspadai hal tersebut.Ia juga meminta agar nelayan menunda ke laut seiring gelombang tinggi di Selat Madura bagian barat bisa mencapai satu meter. "Waspadai banjir rob karena pasang air laut," kata dia di Surabaya.

Mengutip instagram @lovesuroboyo, Kamis (12/11), beberapa perahu nelayan dan rumah warga pesisir ada yang rusak akibat diterjang badai angin kencang pada Rabu, 11 November 2020. "Alhamdullilah, kini air sudah surut dan tidak ada korban jiwa," dikutip dari instagram @lovesuroboyo.

Sementara itu, mengutip instagram @ini_surabaya menggungah video yang menunjukkan angin kencang dan gelombang tinggi telah mendorong air laut masuk ke permukiman warga. Selain itu, sejumlah perahu nelayan pun terkena dampak akibat gelombang tinggi tersebut.

Pertama, terjadi fetch. Arrizal menjelaskan, angin dengan arah konstan dari area luas dengan tekanan tinggi di selatan Indonesia dengan wilayah barat Sumatra. "Wilayah selatan Indonesia 1.000 milibar sedangkan barat Sumatra 1.006 milibar, Wilayah selatan dekat Australia berhembus angin kencang arah konstan dengan kecepatan tinggi, jadi beda tekanan tinggi," ujarnya.

Kedua, gelombang tinggi di Selat Madura bagian barat sekitar 0,5 meter-1 meter. Ketiga, gelombang tinggi dan angin kencang itu juga bertepatan dengan pasang air laut."Kejadian pukul 09.00-10.00 malam itu bertepatan dengan pasang air laut maksimum 70-80 dengan tinggi air muka laut," kata dia.(ard)

PEMPROV JATIM PANTAU INFLASI MELALUI 'JAIM REPORT'

Surabaya - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan inovasi bernama 'Jawa Timur Inflation Monitoring and Report' (JAIM Report). Aplikasi ini diharapkan dapat melakukan pemantauan dan pelaporan kinerja pengendalian inflasi secara periodik.

"Ini merupakan upaya ekstra untuk memantau (monitoring) harga secara real time berdasarkan data harga produsen konsumen, kemudian dianalisis sebagai telaah kebijakan pengendalian inflasi tepat waktu dan sesuai sasaran," ujar Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat S Suwardi di Surabaya.

Melalui aplikasi JAIM Report, pihaknya berupaya memprediksi kemungkinan inflasi di periode akan datang karena biasanya tingkat inflasi Agustus baru turun September sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak update."Aplikasi ini juga diwujudkan sebagai sistem yang memungkinkan untuk menganalisa berbagai faktor penyebab inflasi," ucapnya.

Ia mencontohkan harga telur dan ayam yang diprediksi naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, maka sudah bisa terbaca dari sistem monitoring JAIM Report. "Analisisnya, inflasi itu dipicu oleh harga pakan dari jagung yang terjadi kenaikan," tutur Tiat yang juga sekretaris TPID Jatim itu.

Dengan prediksi inflasi tersebut, TPID sejak dini dapat melakukan antisipasi dengan meminta PT Jatim Graha Utama (JGU) untuk menjadi intermediator.PT JGU akan

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Jatim Tiat S Suwardi menunjukkan surat MoU dalam peluncuran JAIM Report, Rabu (11/11).

menjadi perantara untuk memenuhi suplai pakan seperti jagung dari Bojonegoro atau Bangkalan dengan harga wajar yang selanjutnya akan dibeli oleh Puspa Agro. "Selanjutnya, produksi ayam dan telur peternak juga akan dibeli oleh Puspa Agro sebagai intermediator," katanya.

Sementara itu, untuk memperkuat sistem JAIM Report ini, pihaknya melakukan kerja sama data penghitungan inflasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim.

Untuk diketahui, data terakhir BPS Jatim mencatat Jawa Timur mengalami deflasi 0,02 persen pada Oktober 2020. Sebelumnya pada September 2020, Jatim mengalami deflasi sebesar 0,15 persen. Dari delapan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Jawa Timur yang disurvei BPS, empat kota mengalami inflasi dan empat kota lain mengalami deflasi. Fktor deflasi dipengaruhi adanya penurunan harga sebagian indeks kelompok pengeluaran. Antara lain, kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,17 persen.

Berdasarkan survei indeks harga konsumen (IHK) di Jatim sepanjang Oktober 2020, empat kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Probolinggo sebesar 0,15 persen, Madiun 0,11 persen, Banyuwangi 0,07 persen, dan Jember 0,01 persen.Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar 0,07 persen, Malang 0,06 persen, Kediri 0,05 persen, dan Surabaya 0,02 persen.(ist,ufi)

SEPAKAT MANUAL, SIREKAP TAK DIGUNAKAN DI PILKADA 2020

Jakarta - Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri sepakat aplikasi Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi) tak digunakan untuk rekapitulasi suara di Pilkada Serentak 2020. Rekapitulasi suara tetap menggunakan cara manual.

"Hasil resmi penghitungan dan rekapitulasi suara Pilkada Serentak 2020 didasari oleh berita acara dan sertifikat hasil penghitungan dan rekapitulasi manual," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).

Keempat pihak itu juga menyepakati bahwa aplikasi Sirekap hanya digunakan untuk uji coba dan alat bantu dengan sejumlah catatan. Salah satunya KPU harus memastikan kemampuan penyelenggara pemilihan cakap menggunakan Sirekap.

"Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) hanya merupakan uji coba dan alat bantu penghitungan dan rekapitulasi, serta untuk publikasi, dengan catatan agar KPU RI: Satu, memastikan kecakapan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan untuk dapat memahami penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), sehingga kesalahan dalam penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diminimalisir," ujar Doli.

Selain itu, KPU ditugaskan memetakan jaringan internet semua TPS di Indonesia. Serta turut berkoordinasi dengan Kominfo. "Menyusun peta jaringan internet di tiap TPS pada provinsi, kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 dengan berkoordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI," ucap Doli.

Petugas menyusun kotak suara yang telah dirakit di kawasan Kertalangu, Denpasar, Bali. Rekapitulasi akhirnya akan dilakukan secara manual, tidak menggunakan sirekap.

KPU juga diminta memaksimalkan alat dan fasilitas jaringan internet di setiap daerah. Hal itu diminta agar aplikasi Sirekap dapat digunakan secara maksimal. "Mengoptimalkan kesiapan infrastruktur informasi dan teknologi serta jaringan internet di setiap daerah pemilihan, sehingga penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi Sirekap untuk mengurangi pergerakan dan kerumunan massa," sebut Doli.

"Memastikan keaslian dan keamanan terhadap dokumen digital hasil Sirekap agar meminimalisir penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu," imbuhnya.

KPU sebelumnya menyampaikan draf revisi perubahan KPU (PKPU) kepada Komisi II DPR RI terkait PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tertang rekapitulasi penghitungan suara. KPU berencana menggunakan aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi Pilkada 2020.

"Kemudian penambahan Pasal 24 a, dalam kegiatan Sirekap perlu didukung perlengkapan memadai, jadi di dalam pasal 24 inilah kita sudah mengatur, pertama perlengkapan yang diperlukan dalam penggunaan sirekap terdiri atas, a, ponsel pintar, b, aplikasi Sirekap, c, jaringan internet dan paket data internet," kata Komisioner KPU, Evi Novida dalam RDP dengan Komisi II, di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.

Untuk menunjang aplikasi Sirekap dalam rekapitulasi Pilkada 2020, paling sedikit 2 anggota KPPS harus memiliki ponsel pintar. Nantinya, KPU akan menyediakan paket data internet."Kedua, digunakan dari ponsel pintar digunakan dari ponsel pintar yg dimiliki oleh paling sedikit dari 2 orang anggota KPPS. Ketiga aplikasi Sirekap jaringan internet dan paket data internet disediakan oleh KPU provinsi atau kabupaten/kota," ujar Novida.(ist)

KELAMAHAN SIREKAP VERSI PERLUDEM

1. Sirekap sering kali salah membaca C1 plano atau dokumen yang berisi hasil penghitungan suara di TPS.
2. Ada temuan kasus sistem menolak dokumen yang diunggah petugas TPS. Beberapa alasannya adalah foto tidak terbaca dan jaringan internet tidak dalam kondisi privat.
3. Belum ada mekanisme pengecekan keaslian C1 plano yang diunggah petugas TPS. Saat ini, pengecekan keaslian hanya bersandar pada tanda tangan manual di C1 plano.
4. Petugas TPS butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk menyelesaikan perhitungan suara. Sebab, petugas harus mengisi formulir khusus Sirekap dengan melingkari angka.

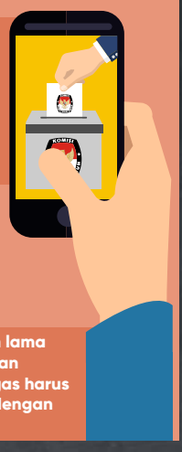

SUDAH 362 ASN KENA SANKSI PELANGGARAN NETRALITAS

Jakarta- Sebanyak 362 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai melanggar netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2020 mendapatkan sanksi pada 5 November 2020. Sanksi tersebut diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

"Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB," kata Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN Otok Kuswandaru dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11).

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian IV Bambang Hari Samasto menyebutkan, netralitas ASN menjadi prasyarat penting bagi terlaksananya fungsi ASN dengan efektif. Baca juga: Bawaslu Ingatkan Sanksi Pidana bagi ASN Pelanggar Netralitas Pilkada

"Yaitu ASN sebagai Pelaksana Kebijakan, Pelayan Publik dan perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujar dia. Bambang menekankan, tak boleh ada per-sepsi tidak masalah jika PNS melanggar netralitas. Penjatuhan sanksi dianggap cara efektif agar pelanggaran netralitas oleh PNS dapat diminimalisir. Data pelanggar netralitas ASN lainnya menyebutkan, sebanyak 827 ASN telah dilaporkan melakukan pelanggaran netralitas. Selain itu, sebanyak 606 ASN yang melanggar, telah mendapat-kan rekomendasi dari KASN. Adapun, 72 ASN lainnya belum ditindaklanjuti PPK dengan penjatuhan sanksi dan data ke-pegawaian diblokir. (ist)

Top 5 instansi dengan kategori pelanggaran netralitas ASN yang belum ditindaklanjuti oleh PPK dan mendapatkan rekomendasi KASN:

- 56 ASN untuk Kabupaten Purbalingga
- 33 ASN untuk Kabupaten Wakatobi
- 24 ASN untuk Kabupaten Bima
- 23 ASN untuk Kabupaten Halmahera Selatan
- 21 ASN untuk Kabupaten Kediri Sementara

Top 5 jabatan ASN kategori pelanggaran dan mendapatkan rekomendasi dari KASN

- 25,7 persen Jabatan Fungsional
- 22,8 persen Jabatan Pimpinan Tinggi
- 14,6 persen Administrator
- 12,9 persen Pelaksana
- 11,5 persen Camat/Lurah

Sebaran wilayah ASN yang data kepegawaiannya telah diblokir

- 4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan
- 4 ASN untuk wilayah kerja Kanreg XII BKN Pekanbaru
- 2 ASN untuk wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang
- 28 ASN untuk wilayah kerja Kanreg IV BKN Makassar
- 3 ASN untuk wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya
- 7 ASN untuk wilayah kerja Kanreg X

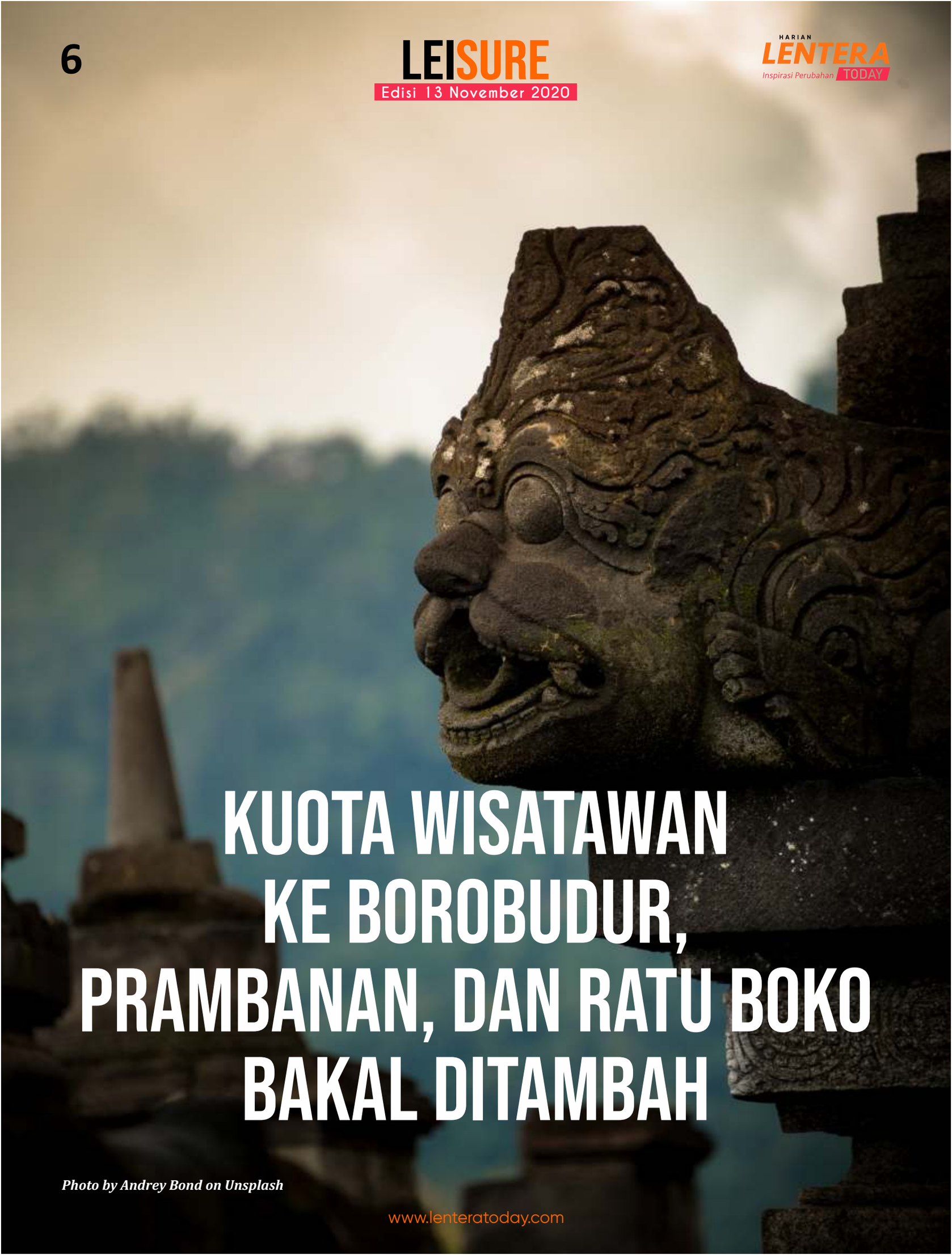

KUOTA WISATAWAN KE BOROBUDUR, PRAMBANAN, DAN RATU BOKO BAKAL DITAMBAH

Photo by Andrey Bond on Unsplash

PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko berencana menambah kuota jumlah wisatawan ke destinasi Candi Prambanan hingga 7.000 orang per hari pada liburan akhir tahun.

Direktur Utama PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko Edy Setijono, mengatakan, hingga saat ini telah uji coba AKB [adaptasi kebiasaan baru] tahap ke tiga dengan kuota wisatawan 5.000 orang per hari. Pada tahap empat nanti, atau saat libur Natal dan Tahun Baru akan ditambah kuota menjadi 7.000 wisatawan,

Menurutnya, pada tahap uji coba operasional sesuai AKB, kuota wisatawan sebanyak 1.500 orang per hari telah berjalan dengan baik sesuai protokol kesehatan Covid-19.

"Kemudian pada tahap dua kuota kami naikkan menjadi 2.500 wisatawan per hari, dan tahap tiga kuota naik lagi menjadi 5.000 wisatawan per hari. Dari hasil evaluasi tahap satu hingga tiga, semua dapat berjalan dengan baik, sehingga nanti uji coba tahap empat kuota kami naikan menjadi 7.000 wisatawan per hari," katanya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY untuk uji coba operasional tahap ke empat.

"Setiap tahap uji coba Satgas Covid-19 DIY selalu memantau AKB pariwisata, dan selama ini kami mendapat penilaian yang baik, sehingga kami mendapat rekomendasi untuk bisa menaikkan kuota pengunjung," jelasnya.

Kuota wisatawan sebanyak 7.000 orang per hari diakuinya sudah sekitar 60 persen dari jumlah rata-rata pengunjung di Candi Prambanan sebelum pandemi Covid-19.

"Jadi memang ini harus kami lakukan bertahap, karena yang paling utama adalah kami ingin memastikan bahwa protokol yang kami jalankan itu betul-betul bisa kita implementasikan. Jadi kami ingin menghadirkan destinasi yang aman, yang sehat yang juga tetap tidak mengurangi kenyamanan dari para wisatawan," katanya.

Naskah / Foto-foto : Antara / Unsplash

Ia mengatakan yang harus disadari bersama adalah bahwa semua fokus di protokol kesehatan, terutama melatih SDM untuk bisa mengimplementasikan standar operasional prosedur (SOP) AKB pariwisata.

"Yang perlu disadari, kami meningkatkan kuota itu tujuannya apa? Untuk melatih kami, melatih pengelola harus bisa mengimplementasikan. Karena beda handling 1.500 dan 2.500 dan 7.000 nantinya. Ini kondisinya berbeda. Nah inilah yang kami selalu evaluasi," katanya.

Bagi wisatawan atau pengunjung Candi Prambanan, kata dia, juga disiplin untuk taat kepada protokol kesehatan, seperti menggunakan masker yang aman dari kain tiga lapis (Ant).

6 JENIS MAKANAN INI BISA **MENURUNKAN RISIKO KANKER**

Gaya hidup khususnya pola konsumsi bisa menimbulkan penyakit kanker pada tubuh. Hal tersebut bisa dicegah dengan mengonsumsi beberapa makanan. Mengutip dari Healthline, Senin (9/11/2020) mengonsumsi makanan yang cepat saji bisa meningkatkan risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Berikut beberapa makanan yang bisa menurunkan risiko kanker pada tubuh:

Kacang

Penelitian menemukan bahwa makan kacang bisa menurunkan risiko kematian yang disebabkan oleh kanker. Studi lain yang mengikuti 30.708 peserta hingga 30 tahun, telah menemukan bahwa makan kacang secara teratur bisa menurunkan risiko colorec.

Tomat

Tomat mengandung likopen. Likopen adalah senyawa dalam tomat yang bertanggung jawab atas warna merah cerah serta sifat anti-kankernya.Beberapa studi telah menemukan bahwa peningkatan asupan likopen dan tomat dapat menurunkan risiko kanker prostat

Buncis & Kayu Manis

Beberapa porsi buncis setiap minggu dapat membantu menurunkan risiko terkena kanker. Selain buncis, Sebuah studi menemukan bahwa ekstrak kayu manis mampu mengurangi penyebaran sel kanker kepala dan leher yang menyebabkan kematiannya.

Brokoli

Brokoli mengandung sulforaphane, senyawa tanaman yang ditemukan dalam sayuran ini memiliki sifat antikanker yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa sulforaphane mengurangi ukuran dan jumlah sel kanker payudara hingga 75 persen.

Wortel

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa makan lebih banyak wortel dikaitkan dengan penurunan risiko jenis kanker tertentu. Ada lima penelitian yang menyimpulkan bahwa makan wortel dapat mengurangi risiko kanker perut hingga 26 persen.

Berries

Dalam satu penelitian pada manusia, 25 orang yang menderita penyakit kanker kolorektal diobati dengan ekstrak bilberry selama tujuh hari, yang ternyata dapat mengurangi pertumbuhan sel kanker hingga 7 persen. (Ist)

Foto : Istimewa

RILIS GALAXY S21, SAMSUNG INGIN BERSAING DENGAN APPLE DAN HUAWEI

Isu Samsung Electronics Co akan memajukan jadwal peluncuran Galaxy S21 kembali muncul. Mereka disebut ingin bersaing dengan Apple dan Huawei. t Up) dan CKD (Completely Knock Down).

Tiga orang narasumber yang tidak disebutkan identitasnya, dikutip dari Reuters, (Senin, 9/11/2020) menyatakan Samsung memajukan peluncuran Galaxy S21 sebulan lebih awal karena mengincar pangsa pasar dari Huawei dan berkompetisi dengan Apple.

Huawei beberapa waktu belakangan menggantikan posisi Samsung sebagai pemain teratas di pasar ponsel global.

Huawei mengalahkan Samsung pada kuartal kedua, namun, Samsung kembali menjadi nomor satu pada kuartal ketiga karena Amerika Serikat membatasi perdagangan dengan Huawei.

Samsung kini sedang bersiap meluncurkan Galaxy S21 pada akhir Januari 2021. Galaxy S biasanya diluncurkan sekitar awal Maret setiap tahun.

Samsung tidak berkomentar atas kabar ini.

Seperti diwartakan sebelumnya, Galaxy S21 dilaporkan akan meluncur dan bisa langsung dipesan pada 14 Januari mendatang. Sementara penjualan perdana konon akan dilakukan dua minggu setelah peluncuran, yakni 29 Januari 2021.Galaxy S21 bakal hadir dalam tiga model, yakni Galaxy S21, S21 Plus, dan S21 Ultra, serta bakal hadir dalam enam varian warna, yaitu Black, White, Grey, Silver, Violet, dan Pink.

Informasi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah, lantaran masih sebatas bocoran. Samsung sendiri belum mengumumkan tanggal peluncuran Galaxy S21 kepada publik. Mendekati tanggal peluncuran, Samsung biasanya gemar mengumbar video teaser atau poster undangan Galaxy Unpacked di sejumlah kanal media sosialnya (Ant).

HARIAN LENTERA Inspirasi Perubahan TODAY

HARIAN **"LENTERA TODAY"**
PENANGGUNG JAWAB TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA : AGUSTINA WIDYAWATI, LUTFI YUHANDI, TARMUJI TALMACSI (ID SERTIFIKASI 16216), JUNAIDI (ID SERTIFIKASI 4175), IMAN GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), ARIF ARDLIYANTO (ID SERTIFIKASI 6295) **I** ARDINI PRAMITHA **I SIDOARJO :** ANGGA PRAYOGA **I GRESIK :** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) **I PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI :** IMAN SANTOSO, PURCAHYONO JULIATMOKO **I BLITAR-TULUNGAGUNG-TRENGGALEK :** ARIEF SUKAPUTRA, IRVAN FAUZI **I KEDIRI-NGANJUK-JOMBANG :** GATOT SUNARKO, RONY KURNIAWAN **I MADIUN-PONOROGO :** NECODEMUS GERRY SETIAWAN **I MOJOKERTO :** WISNU JOEDHA **I PALANGKARAYA :** BAGUS TRI WIDIANTORO

DIREKTUR BISNIS DAN KOMERSIAL SUPARTI, SH, MM **I MANAGER HRD** SUHARDIMAN EKO PRASETYO **I PENASEHAT HUKUM** Dr. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH
MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO, ARSO YUDIANTO **I SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH **I DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN
ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 **I TELP** 03187854491 **I PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA **I ALAMAT BIRO MALANG** JL. KEBALEN WETAN 1040 B
ALAMAT BIRO JAKARTA : GED. HARCO, PLAZA PASAR BARU, LANTAI DASAR NO 147 JAKARTA PUSAT **I ALAMAT BIRO BALI :** PERUM TAMAN MULIA, JALAN ANGGREK 100 JIMBARAN, KUTA SELATAN, BADUNG, BALI **I ALAMAT BIRO KALIMATAN TENGAH** : JL. YOS SUDARSO II B No.6 Palangkaraya **I ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA **I TELP IKLAN** 031-87854491 **I NIB** 91205006801134 **I HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

PORI-PORI BESAR?
COBA ATASI DENGAN CARA INI

Kulit berminyak adalah salah satu penyebab yang membuat pori-pori menjadi terbuka dan besar di wajah. Apalagi pori-pori terbuka terlihat seperti kulit jeruk dan tampak kasar.Ini biasanya disebabkan oleh produksi sebum yang berlebihan, yang merupakan minyak kulit alami. Namun, faktor stres, genetika, dan perawatan kulit yang buruk juga bisa menimbulkan pori-pori besar yang bikin tak percaya diri. Namun kamu tak usah khawatir, pori-pori besar bisa diatasi dengan berbagai cara berikut ini. Simak yuk!

ALOE VERA

Mengoleskan gel lidah buaya setiap hari bisa membuat kulit Anda mulus. Lidah buaya dapat membantu mengecilkan pori-pori, membersihkan dan menutrisi kulit serta menghilangkan minyak dan kotoran dari pori-pori yang tersumbat.

Caranya, oleskan gel lidah buaya segar pada pori-pori dan pijat selama beberapa menit. Biarkan gel lidah buaya menempel di kulit Anda selama 10 menit. Lalu bilas dengan air dingin.

CUKA SARI APEL

Cuka sari apel dikenal dapat membersihkan kulit dan juga mengecilkan pori-pori. Cuka sari apel ini adalah sebagai toner yang bisa mengencangkan kulit Anda, ini juga dapat mengurangi peradangan pada wajah Anda Caranya, encerkan cuka sari apel dalam air.

Celupkan bola kapas ke dalamnya dan oleskan cuka ke wajah. Biarkan mengering. Gunakan cuka sari apel sebagai toner kulit setiap hari

PEPAYA

Pepaya dapat membantu mengencangkan kulit serta pori-pori kulit. Ini sangat ampuh membersihkan kulit dengan menghilangkan kotoran dan pori-pori yang tidak tersumbat.

Cara-nya, hancurkan pepaya dan oleskan pada wajah. Biarkan selama 20 menit sebelum dibilas dengan air. Ulangi pengobatan ini setiap dua hari sekali.

PUTIH TELUR

Putih telur ini dapat mengencangkan kulit, yang membantu mengecilkan pori-pori yang membesar. Menggunakan masker telur adalah obat yang sangat baik untuk pori-pori terbuka dan juga dapat digunakan untuk mengatasi berbagai jenis jerawat.

Caranya, ambil putih telur dan campur dengan oatmeal dan jus lemon. Buat pasta yang rata. Oleskan pasta di wajah Anda dan biarkan selama 30 menit. Bilas dengan air dingin. Lakukan ini dua kali seminggu untuk mendapatkan kulit yang cantik.

BAKING SODA

Soda kue adalah salah satu bahan dapur sederhana yang memiliki sifat antibakteri dan anti-inflamasi yang membantu mengurangi komplikasi seperti jerawat, mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan kotoran lainnya.

Caranya, buat pasta dengan campuran soda dan air hangat. Oleskan pasta ke pori dan pijat dengan lembut dalam gerakan melingkar selama sekitar 30 detik. Bilas sampai bersih menggunakan air dingin. Gunakan obat ini sekali dalam tiga sampai empat hari.(ist)

'Bau Anyir' *(dari hal 1)*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir praktik monopoli dalam kegiatan logistik usaha ekspor benih lobster. Bisnis jasa pengiriman benih lobster ini ditengarai hanya terkonsentrasi pada satu perusahaan saja.Perbuatan ini disinyalir membuat tarif ekspor menjadi mahal.

"Karena tidak ada pilihan perusahaan lain untuk pengiriman benih. Pengiriman dilakukan melalui satu pihak, sedangkan budidaya BBL (benih bening lobster) tersebar di banyak wilayah," tutur Direktur Investigasi KPPU Gopera Panggabean saat konferensi pers virtual, Kamis (12/11).

Penelitian KPPU ini berangkat dari laporan asosiasi yang bergerak di bidang industri benih lobster kepada KPPU beberapa waktu lalu. Asosiasi yang tak dirincikan namanya tersebut menyatakan bahwa eksportir saat ini hanya bisa mengirimkan komoditasnya lewat satu badan usaha logistik. Titiknya pun diatur melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menurut Gopera, berdasarkan peraturan ekspor benih lobster, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mengatur adanya penunjukan perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyedia jasa pengirim.

Badan karantina perikanan pun disebut sudah merekomendasikan beberapa titik sebagai lokasi pengiriman benih lobster. Dengan begitu, praktik yang hanya melibatkan satu entitas ini tidak memiliki dasar hukum.

Selain menyebabkan tarif ekspor melambung, dugaan monopoli usaha jasa pengiriman membuat risiko yang dihadapi pengusaha benih lobster lebih besar. Sebab, pengiriman yang hanya melalui satu titik membuat rantai distribusi menjadi panjang dan komoditas hidup dihadapkan dengan mortality rate atau kematian yang tinggi.

Padahal, komoditas ekspor benih lobster berasal dari banyak wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalnya, Nusa Tenggara Barat, Bengkulu, dan Natuna. "Jadi seharusnya semua perusahaan forwarder itu bisa melakukan pengiriman," katanya.

Sementara itu, Komisioner KPPU, Guntur Syah Saragih, mengatakan pihaknya sedang meneliti kondisi yang menyebabkan pengiriman terfokus pada satu perusahaan logistik tertentu.Dia menyebut lembaganya bakal melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menemukan alat bukti. Jika terdapat bukti-bukti yang lengkap, KPPU akan menaikkan perkara ini ke penyelidikan."Dari penelitian masih bisa berkembang pada siapa saja sasarannya. Tindakan itu tidak hanya kegiatan dilarang, bisa saja perjanjian yang dilarang," kata Guntur.

Guntur mengungkapkan, praktik monopoli dalam usaha logistik itu di duga sengaja dilakukan untuk membuat pola kegiatan bisnis menjadi tidak efektif. Mengingat letak perusahaan logistik itu ada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Sedangkan, saat ini eksportir lobster tersebar di beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, dan Sumatera. Akibatnya pengusaha benih lobster akan menanggung biaya logistik tinggi setiap kali melakukan pengiriman benih lobster ekspor.

"Bisa dibayangkan berapa ongkos yang harus di keluarkan oleh pelaku usaha. Jika barang ada di NTB kemudian harus dikirim lewat Jakarta. Dan ini kan berhubungan dengan penanganan benda hidup memerlukan waktu pengiriman yang cepat," paparnya.

Meski dmeikian, KPPU tepis adanya keterlibatan pemerintah yang mengarahkan ekspor benih lobster pada salah satu perusahaan jasa pengiriman logistik (forwarding) benih bening lobster (BBL). Tidak adanya keterlibatan pemerintah dalam dugaan praktik kotor ini berdasarkan keterangan langsung dari beberapa pihak perwakilan pemerintah terkait.

"Kami sudah melakukan advokasi dan kami meyakini tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk mengarahkan pada satu pelaku usaha tertentu. Jadi ini clear. Kami sudah panggil dan diketahui tak ada kebijakan itu, jadi dari sisi kebijakan itu tidak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta KPPU turun tangan mengungkap dugaan praktik monopoli pengangkutan ekspor lobster. Monopoli membuat iklim usaha tidak sehat dan biaya ekspor menjadi mahal.

Politikus Golkar itu juga memberikan dukungan kepada jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang telah mencegah ekspor benih bening lobster (BBL) tujuan Vietnam di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Selasa (15/9) lalu. Tak sekadar mendukung langkah DJBC, politikus Golkar itu juga mengendus dugaan patgulipat dan praktik monopoli bisnis forwarding (pengangkutan) BBL.

"Saya mendukung upaya dan langkah tegas DJBC dalam mencegah ekspor BBL bermasalah. DJBC secara institusional memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan ekspor berkaitan dengan jumlah, jenis maupun aturan lartas (larangan terbatas, red) sesuai dengan UU Kepabeanan," ujarnya.(ist,ins)

MENGULIK PRO-KONTRA KEBIJAKAN EKSPOR BENIH LOBSTER

Melalui Permen KKP 12/2020, pemerintah mengizinkan ekspor benih lobster. Kebijakan ini menuai kontroversi. Sebab, Menteri KKP sebelumnya Susi Pudjiastuti melalui Permen 56/2016 melarang ekspor benih lobster. Selain tidak memiliki nilai tambah, kebijakan ini rentan diekploitasi dan mengancam ekosistem lingkungan

Supaya perusahaan mendapat kuota ekpor, eksportir harus :
- Memiliki nelayan binaan
- Mampu melakukan budi daya lobster
- Mengembalikan 2 persen hasil panen ke alam (restocking)

"Permen itu bagus karena memberikan kesempatan yang tidak diberikan oleh Ibu Susi, yaitu budi daya. Budi daya pasti ada proses, gak langsung berhasil. Nah kebijakan ini untuk menyemarakkan semangat budi daya"

Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Padjajaran

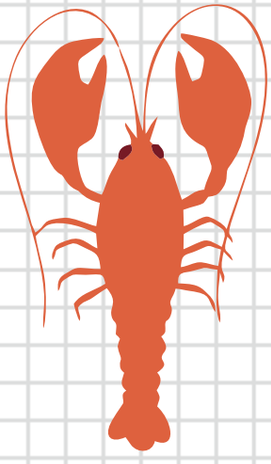

Kritik LSM dan pengamat kelautan terhadap Permen 12/2020 :
- Sarat Kolusi, menguntungkan kolega dan lingkaran politik tertentu
- Pengawasan yang lemah, persyaratan mudah diakali
- Benih lobster bisa langka
- Nelayan pesisir lebih memilih bekerja menjadi nelayan tangkap lobster
- Berpotensi melahirkan kortel Eksportir benih Lobster, menguntungkan pengusaha besar

"Ada cacat logika di Permen itu. Apa iya setelah tiga tahun kita budi daya sambil ekspor terus tahun keempat kita sudah ahli budi daya? Adanya nanti ketika sudah bisa budi daya, benihnya malah langka"

Abdul Halim, Direktur Eksekutif Kajian Maritim untuk Kemanusiaan

BUKAN PANDEMI, COVID-19 KINI JADI SINDEMI

Membiasakan cuci tangan menjadi salah satu langkah mencegah penyebaran covid-19

Jakarta- Hampir setahun pandemi Covid-19 menghantui dunia. Jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia sudah mencapai angka 50 juta. Uji coba lebih dari selusin calon vaksin pun telah dilakukan dan beberapa diantaranya telah menyelesaikan fase 3 atau tahap akhir uji klinis.

Melihat penyebaran belum bisa dihentikan, para ilmuwan pun menilai virus inibukan lagi pandemi seperti yang ditetpkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), tapi lebih cocok disebut sindemi.

Apa itu sindemi dan bagaimana seharusnya penanganan Covid-19 dilakukan? Sindemi adalah akronim yang berasal dari kata sinergi dan pandemi. Artinya, penyakit seperti Covid-19 tidak boleh berdiri sendiri.

"Semua intervensi kita berfokus pada memotong jalur penularan virus untuk mengendalikan penyebaran patogen," kata Richard Horton, pemimpin redaksi jurnal ilmiah The Lancet, Kamis (12/11).

Di satu sisi ada virus SARS-CoV-2, yaitu virus penyebab Covid-19 dan di sisi lain ada serangkaian penyakit yang sudah diidap oleh seseorang. Kedua elemen ini saling berinteraksi dalam konteks ketimpangan sosial yang mendalam.

Mengingat pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada awal tahun 2020, yang mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 dialami secara tidak proporsional pada kelompok masyarakat paling rentan. Di antaranya orang yang hidup dalam kemiskinan, pekerja miskin, perempuan dan anak-anak, serta penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya.

Sindemi bukanlah istilah baru dan telah muncul sekitar tahun 1990-an yang diciptakan oleh antropolog medis asal Amerika Serikat, Merill Singer. Istilah ini dicetuskannya untuk menyebut kondisi ketika dua penyakit atau lebih berinteraksi sedemikian rupa, sehingga menyebabkan kerusakan yang lebih besar ketimbang dampak dari masing-masing penyakit tersebut.

"Dampak dari interaksi ini juga difasilitasi oleh kondisi sosial dan lingkungan yang entah bagaimana dapat menyatukan kedua penyakit atau membuat populasi menjadi lebih rentan terhadap dampaknya," jelas Singer.

Istilah sindemi muncul saat ilmuwan tersebut bersama koleganya meneliti penggunaan narkoba di komunitas berpenghasilan rendah di Amerika Serikat pada lebih dari dua dekade lalu. Singer dan timnya menemukan bahwa banyak dari masyarakat itu yang menggunakan narkoba menderita sejumlah penyakit seperti TBC dan penyakit menular seksual.

Selanjutnya para peneliti mempertanyakan bagaimana penyakit-penyakit ini dapat berada di dalam tubuh seseorang. Kesimpulannya, dalam beberapa kasus, kombinasi penyakit memperkuat dampak dan kerusakan yang dialami orang itu. "Kami melihat bagaimana Covid-19 berinteraksi dengan berbagai kondisi yang sudah ada sebelumnya, diabetes, kanker, masalah jantung dan banyak faktor lain," kata Singer.

Bahkan tak hanya itu, mereka juga melihat adanya tingkat yang tidak proporsional dari dampak yang merugikan di komunitas masyarakat miskin, berpenghasilan rendah dan etnis minoritas. Pengaruh lingkungan sosial ekonomi juga menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko Covid-19.

Menurut Tiff-Annie Kenny, peneliti di Laval University di Kanada mengatakan penyakit seperti diabetes atau obesitas, yang termasuk faktor risiko Covid-19 tersebut lebih sering dialami pada orang-orang berpenghasilan rendah. Di tengah kondisi wilayah dengan kerawanan pangan, perubahan iklim hingga pengaturan perumahan yang buruk, akan semakin sulit untuk menjalankan rekomendasi kesehatan seperti mencuci tangan atau menjaga jarak.

Tak selalu akses kesehatan yang terbatas, makanan, pendidikan atau kebersihan, maupun penyakit lain dapat memperparah penyakit bawaan memengaruhi kondisi sosial ekonomi terkait dampak dari suatu penyakit.

"Jika kita benar-benar ingin mengakhiri pandemi ini yang efeknya telah menghancurkan masyarakat, kesehatan, ekonomi. Pelajarannya, kita harus mengatasi kondisi mendasar yang memungkinkan terjadinya sindemi," jelas Singer.

Horton juga mendukung pandangan tersebut. Sebab, seberapa efektif pengobatan atau seberapa protektif vaksin Covid-19 yang tengah dikembangkan, pencarian solusi yang murni biomedis akan gagal mengatasi pandemi Covid-19. "Kecuali pemerintah merancang kebijakan dan program untuk mengubah kesenjangan mendalam, masyarakat tidak akan pernah benar-benar aman dari penyakit ini," jelas Horton.(ist,ins)
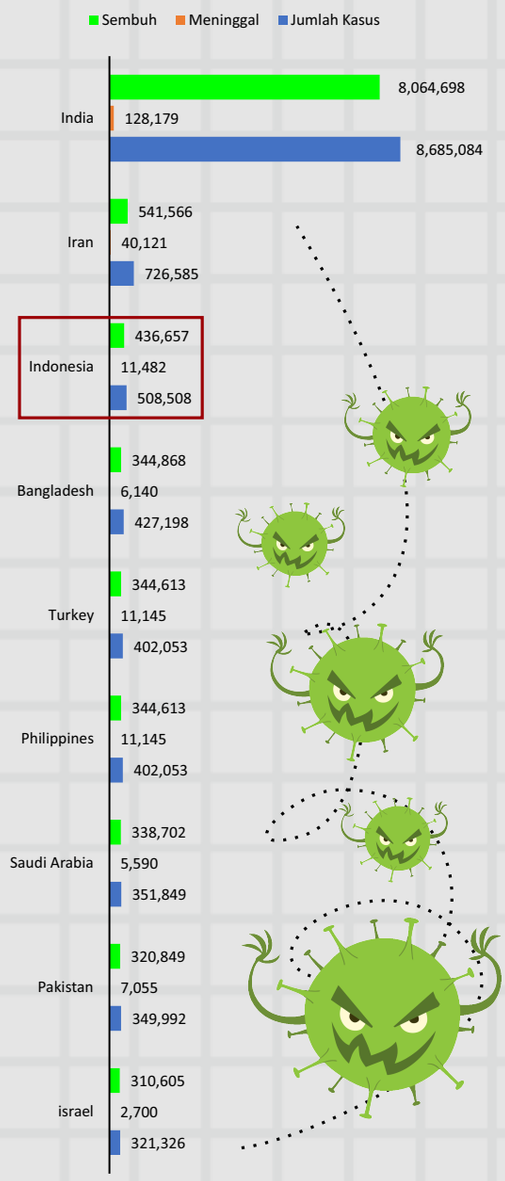
TOP 10 NEGARA DENGAN KASUS CORONA TERBANYAK DI ASIA